

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2014 merupakan tahun yang bersejarah dalam perkembangan politik Indonesia, dimana pada tahun itu digelar pesta rakyat yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pada pemilu tersebut terpilihlah Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam pesta demokrasi tersebut juga menunjukkan besarnya semangat masyarakat dalam ikut serta mensukseskan terselenggaranya pemilu tersebut. Arianto (2014: 131) menganggap fenomena ini sebagai penanda awal atas berkembangnya demokrasi partisipatoris di Indonesia dimana demokrasi partisipatoris merupakan demokrasi yang lebih memberikan perluasan akan partisipasi publik dengan basis utama atas kepedulian dan persoalan publik. Hal tersebut dibuktikan dengan peran serta relawan (*volunteer*) politik dalam memenangkan calonnya masing-masing.

Salah satu relawan politik yang begitu terlihat sejak terjangnya kala itu adalah relawan pro Jokowi, dimana relawan tersebut bergerak begitu masif di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut senada dengan yang diberitakan kompas.com yang menyebut bahwa relawan pro Jokowi terus bergerak untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi, dimana projo bertugas mengorganisir masyarakat untuk ikut mendukungnya menjadi presiden. Para relawan aktif mendukung Jokowi dengan strategi-strategi kekinian yang mudah dijangkau masyarakat yaitu melalui berbagai media sosial, seperti salah satunya adalah *twitter*. (<http://nasional.kompas.com/read/2014/04/18/2201576/Jokowi>.

Kekuatan Saya Ada di Relawan diakses 29 Desember 2017)

Fenomena relawan Jokowi telah muncul sejak tahun 2012 ketika dilaksanakannya kontestasi politik pemilihan gubernur DKI Jakarta lalu. Hal tersebut dibuktikan dengan berita yang ada di tribunnews yang menyebutkan bahwa fenomena relawan yang muncul di pilgub DKI Jakarta merupakan sebuah fenomena yang muncul karena adanya keinginan besar masyarakat akan adanya perubahan. Hal tersebut juga memperlihatkan terjadinya aktifitas politik yang digerakan langsung oleh masyarakat, dimana masyarakat yang dulunya pasif justru menjadi aktif dan terjun langsung dalam aktifitas politik karena adanya sosok Jokowi, sebagai tokoh yang mereka percaya. ([http:// www.tribunnews.com/metro-politan/ 2012/ 09/ 14/ pendukung-jokowi-dan-political-cityzen](http://www.tribunnews.com/metro-politan/2012/09/14/pendukung-jokowi-dan-political-cityzen) diakses pada 29 Desember 2017)

Tahun 2012 lalu benar-benar memperlihatkan hal menarik dalam kontestasi politik di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena pertarungan pilgub DKI Jakarta seperti pertarungan antara rakyat melawan partai, dimana Fauzi Bowo yang kala itu didukung oleh banyak partai kuat seperti Demokrat, PAN, PKB, Hanura melawan Jokowi yang hanya didukung sedikit partai namun disokong oleh besarnya relawan politik yang muncul. Akhirnya cukup mengejutkan, dimana kemenangan diraih oleh Jokowi, hal tersebut tidak luput dari besarnya peran dari relawan Jokowi kala itu seperti yang tertulis di laman kompasiana.com. Kompasiana menyebut bahwa dalam pilgub DKI Jakarta, rakyat bukan lagi sebagai pengembira dalam pemilu, melainkan rakyat semakin aktif dan condong untuk ingin melakukan pemberontakan pada hegemoni partai. Para relawan Jokowi aktif berpartisipasi memperkenalkan sosok Jokowi ke masyarakat, mereka bergerak bergerilya kesegala peniuru. mulai dari sudut-sudut paling elit hingga

pojok-pojok terkumuh ibukota. Media kampanye para relawan pun beragam, mulai dari bertatap muka langsung dengan kalangan akar rumput hingga membuat tulisan-tulisan pada media sosial, blog, maupun forum online. (<https://www.kompasiana.com/zih.anonymous/fenomena-jokowi-ahok-dan-harapan-baru-demokrasi-indonesia-partai-vs-rakyat-2-habis> diakses pada 29 Desember 2017)

Puncak dari partisipasi politik relawan Jokowi adalah pada tahun 2014 ketika pemilu presiden dilaksanakan. Relawan semakin terorganisir dalam bergerak, dimana mereka membentuk organisasi-organisasi relawan untuk mempermudah komunikasinya. Salah satu organisasi relawan yang terbentuk adalah kelompok relawan pro Jokowi. Relawan pro Jokowi sendiri mulai naik kepermukaan ketika kesadaran pentingnya nilai politik yang melampaui kepentingan partai dari pengalaman pilgub DKI Jakarta muncul. Bukan karena faktor partai politik yang mendukung Jokowi melainkan pentingnya nilai politik untuk mendukung sosok Jokowi yang menjadi alasan mendasar adanya relawan pro Jokowi tersebut. Meski demikian, kehadiran relawan politik ini dapat disinergikan dengan adanya tim sukses kampanye pemenangan Jokowi dari partai pendukungnya, sehingga lahirlah gerakan relawan pro Jokowi yang militan dengan mendapat dukungan partai pendukung untuk bergerilya ke masyarakat. Relawan pro Jokowi yang terdiri dari berbagai kalangan, saling bergerilya di penjuru daerah Indonesia sehingga terlihat bahwa gerakan ini sangat militan dan masif dalam mendukung Jokowi. Hal inilah yang menjadi pilar kekuatan dan kesuksesan Jokowi pada tahun 2014 dimana relawan memiliki kesempatan lebih besar untuk berdialog dengan leluasa dari pintu ke pintu dengan calon pemilih.

Tidak seperti pemilu-pemilu sebelumnya, dapat dilihat bahwa kesuksesan Jokowi pada 2014 tidak hanya dipengaruhi oleh partai-partai politik yang mengusungnya kala itu tetapi juga merupakan kemenangan yang sangat dipengaruhi oleh peran dari relawannya. Seperti yang disampaikan peneliti Lingkaran Survey Indonesia (LSI) dalam laman tempo.com bahwa faktor kunci kemenangan Jokowi adalah kemampuan relawan berkampanye dalam 20 hari terakhir mendekati pemilih dari rumah ke rumah. Relawan inilah yang membuat elektabilitas Jokowi naik hingga tujuh persen. ([https:// pemilu.tempo.co/ read/news/ 2014/ 07/ 10/ 269592012/ LSI - Relawan-Kunci-Kemenangan-Jokowi/](https://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/10/269592012/LSI-Relawan-Kunci-Kemenangan-Jokowi) diakses pada 29 Desember 2017)

Strategi-strategi yang di jalankan oleh relawan pro Jokowi merupakan kunci utama kemenangan Jokowi kala itu. Detik.com menyebut bahwa salah satu strategi relawan pro Jokowi yang dinilai efektif adalah melalui media sosial. Ada 3 strategi utama yang menjadi ujung tombak relawan, yaitu relawan yang mengunggah prestasi Jokowi, relawan yang aktif berdebat di laman diskusi *online*, dan relawan yang aktif di media sosial dengan memberitakan fakta-fakta negatif tentang Prabowo-Hatta. (<https://news.detik.com/survei/2615023/ini-3-strategi-relawan-jokowi-jk-perang-di-media-sosial> diakses pada 29 Desember 2017)

Selain melalui media sosial, relawan pro Jokowi juga melakukan kampanye dengan bergerilya dipenjuru daerah. Salah satu hal menarik yang dilakukan relawan dalam strategi kampanyenya adalah dengan menerapkan strategi MLM (*multilevel marketing*) untuk mencari dukungan masyarakat. Tempo.com menyebut bahwa strategi tersebut dijalankan dengan mengerahkan relawan agar melakukan pendekatan dari pintu ke pintu untuk menggerakkan masyarakat

mendukung Jokowi. Setiap relawan mendata minimal 9 orang untuk memilih Jokowi, kemudian 9 orang tersebut diminta untuk mendata 9 orang lainnya dan terus berjalan seperti itu. Akhirnya dengan banyaknya peran relawan dan berjalannya strategi yang direncanakan menjadi kunci kemenangan Jokowi dalam pilpres 2014 lalu. ([https:// pemilu.tempo.co/ read/ news/ 2014/ 06/ 05/ 269582750/ Relawan-Jokowi-JK-Adopsi-MLM-untuk-Kampanye](https://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/05/269582750/Relawan-Jokowi-JK-Adopsi-MLM-untuk-Kampanye) diakses pada 29 Desember 2017)

Lebih dari itu, dengan besarnya pengaruh relawan terhadap kemenangan Jokowi juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan diambil Jokowi setelah menjadi Presiden Republik Indonesia. Pasca pemilu 2014, menjadi hal yang sangat menarik untuk dilihat, dimana peran dari relawan politik tentu akan berubah drastis apabila dibandingkan dengan musim kontestasi pemilu 2014. Dalam perkembangannya, relawan Pro Jokowi sendiri memilih untuk tidak membubarkan diri pasca selesainya pemilu 2014. Para relawan justru memilih untuk mengubah status relawan pro Jokowi menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) Pro Jokowi. Perubahan status menjadi ormas tersebut dikarenakan keberadaan relawan politik dianggap telah selesai setelah pemilu presiden 2014 berakhir dan perlu adanya pengikat untuk mempererat para relawan.

Ormas Pro Jokowi didirikan pada tanggal 23 Agustus 2014 ketika diadakannya kongres I Projo, dimana kemudian projo berkedudukan di Jalan Pancoran Timur Raya No. 37, Perdatam Pancoran, Jakarta Selatan. Pembentukan ormas ini memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, Memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan dan memelihara

norma, nilai, moral, etika, budaya yang hidup dalam masyarakat, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang terakhir mewujudkan tujuan Negara. (<http://www.projo.id/projo/tentang-projo/> diakses pada 29 Desember 2017)

Lebih spesifik lagi, berdirinya ormas ini adalah untuk mengawal jalannya pemerintahan Jokowi, yang diartikan sebagai suatu bentuk prinsip relawan Pro Jokowi yang ingin menyelaraskan program pemerintah dengan harapan rakyat. Selain itu dengan bentuk ormas ini, relawan Pro Jokowi juga berupaya untuk mengontrol pemerintahan Jokowi-JK untuk tetap dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat.

Dalam perjalanannya, Pro Jokowi terus bergerak walaupun kontestasi politik telah usai. Pro Jokowi terus bergerak mendukung kebijakan pemerintahan Jokowi periode 2014-2019, dimana hal tersebut terlihat dari gencarnya pemberitaan kegiatan Presiden Jokowi dalam situs resminya yaitu projo.id. Selain itu, Pro Jokowi juga turut serta mengkritisi kinerja pemerintahan dari presiden Jokowi. Seperti yang diberitakan oleh CNN Indonesia menyebut bahwa Pro Jokowi yang diwakili oleh ketua umumnya, Budi Arie meminta para menteri di jajaran kabinet Kerja Jokowi untuk mengoptimalkan kerjanya agar perekonomian Indonesia dapat meningkat. ([https:// www.cnnindonesia.com/ nasional/ 20150824070557-20-73983/ relawan-iokowi-krisis-akan-iii-loyalitas-menteri](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150824070557-20-73983/relawan-iokowi-krisis-akan-iii-loyalitas-menteri)

Pro Jokowi juga rutin menggelar rapat kerja nasional sebagai agenda tahunan. Yang terakhir adalah rakernas ke III tahun 2017 yang diadakan di Sport Mall Britama Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada tanggal 4 September 2017 lalu. Dalam rakernas tersebut diikuti lebih dari 2000 utusan dari 34 Provinsi dan 501 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia serta dihadiri juga oleh Presiden Jokowi. Dalam rakernas tersebut menghasilkan beberapa poin penting seperti Pro Jokowi berada di garis depan untuk mencegah perubahan ideologi bangsa, Pro Jokowi juga mendukung penuh kebijakan politik Jokowi yang pro rakyat dan dukungan ke Rohingya. Selain itu Pro Jokowi juga mendukung keselarasan kebijakan pusat dan daerah dalam bentuk dukungan politik di Pilkada, serta yang terakhir adalah Pro Jokowi melakukan deklarasi untuk mendukung kembali Jokowi dalam pemilu presiden 2019 seperti yang diberitakan oleh kompas.com. (<http://nasional.kompas.com/read/2017/09/04/16080351/gelar-rakernas-projokingin-jokowi-dua-periode> diakses pada 29 Desember 2017)

Selama periode pemerintahan Jokowi, relawan Pro Jokowi tetap ada dan aktif untuk mendukung serta mengawal kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah sampai saat ini. Seiring berjalannya waktu, periode pemerintahan Jokowi sebentar lagi akan usai, dan pesta demokrasi 2019 yaitu pemilu presiden pun akan segera dimulai. Pro Jokowi bergerak cepat dengan segera melakukan manuver-manuver yang pada muaranya bertujuan untuk mengantarkan Jokowi kembali menduduki singgasana tertinggi di Republik Indonesia. Manuver yang dilakukan oleh Pro Jokowi adalah dengan mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi menjadi presiden kembali dalam rakernas Pro Jokowi ke III tahun 2017 lalu. Hal tersebut disampaikan ketua umum Pro Jokowi, Budi Arie kepada

republika.com bahwa keinginan untuk memberikan dukungan ini karena pemerintahan Jokowi dinilai telah melakukan banyak perubahan. (<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/09/04/ovrfcc-jokowi-singgung-pencapresan-dalam-rakernas-projo> diakses pada 29 Desember 2017)

Dengan aktifnya Pro Jokowi dalam dunia politik Indonesia baik ketika pemilu sampai pasca pemilu dan akhirnya menuju pemilu 2019 yang akan datang menunjukkan konsistensinya dalam partisipasi politik sebagai relawan non partai politik di Indonesia. Hal tersebut menjadi latar belakang ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana bentuk voluntarisme relawan Pro Jokowi dalam mendukung Presiden Jokowi selama periode 2014-2019. Apakah gerakan relawan Pro Jokowi dapat menjadi sebuah wajah kemajuan demokrasi di Indonesia yang tidak hanya didominasi oleh partai dan elit politik saja. Akankah relawan Pro Jokowi dapat menunjukkan bahwa peran masyarakat sangatlah diperlukan dalam mewujudkan kemajuan Negara, atau malah sebaliknya Pro Jokowi hanya dijadikan sebagai alat politik dari penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka penulis ingin mengetahui:

1. Bagaimana peran relawan Pro Jokowi DIY dalam partisipasinya sebagai organisasi relawan di Indonesia?
2. Bagaimana strategi relawan Pro Jokowi DIY dalam mempertahankan eksistensinya di dunia politik maupun pemerintahan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran relawan Pro Jokowi DIY dalam partisipasinya sebagai organisasi relawan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi relawan Pro Jokowi dalam mempertahankan eksistensinya sebagai relawan di dunia politik maupun pemerintahan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini:

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pemahaman mengenai pola voluntarisme yang ada dalam perkembangan politik di Indonesia saat ini.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan:

- a. Menjelaskan perkembangan voluntarisme dalam politik di Indonesia.
- b. Mengkaji mengenai peran relawan politik dalam partisipasinya sebagai organisasi non parpol di Indonesia.
- c. Menganalisis strategi relawan politik dalam mempertahankan eksistensinya di dunia politik maupun pemerintahan Indonesia.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Teori Voluntarisme Politik

Partisipasi politik menurut Miriam Budiardjo (2008: 367) adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dimana secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kebijakan publik. Charles Adrian dan James Smith dalam Marijan (2010: 111) menambahkan pendapat bahwa ada 3 bentuk partisipasi politik. Pertama, yaitu partisipasi pasif, dimana orang-orang hanya tertarik untuk melihat pergerakan politik dan suka berdiskusi membahas perkembangan politik yang ada. Kedua adalah partisipasi aktif, dimana orang-orang terlibat dalam organisasi-organisasi atau asosiasi-asosiasi sukarela, seperti kelompok keagamaan, olahraga, pencinta lingkungan, organisasi profesi, dan organisasi buruh. Kemudian yang terakhir, adalah partisipasi yang berupa kegiatan-kegiatan protes, seperti ikut menandatangani petisi, memboikot, dan berdemonstrasi.

Menurut Herbert McClosky dalam Sutrisno (2015: 3) partisipasi politik dari masyarakat dapat diartikan sebagai sukarela adalah dinilai dari sejauh mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Definisi dari kesukarelaan sendiri adalah kemauan sendiri atau kehendak sendiri untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Sikap kesukarelaan dapat berwujud dengan adanya kelompok/tim yang tergabung dalam satu tujuan untuk menyampaikan informasi tentang ide, gagasan, visi, misi, program dan harapan/tujuan. Keberadaan relawan juga menandakan adanya kesadaran

masyarakat terhadap keikutsertaannya untuk menentukan pemimpin negara sebagai wakil dalam memperjuangkan aspirasinya, semakin besar tingkat keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik akan menentukan kualitas dari demokrasi itu sendiri.

Suryadi dalam Arianto (2014: 131) menjelaskan bahwa secara historis politik, istilah relawan (*volunteer*) muncul sejak tahun 1755, yang dikenalkan oleh seorang warga negara Perancis M. Fr Voluntaire ketika memberi pelayanan kepada tentara yang sedang berperang. Tugas dari seorang relawan adalah untuk mengabdikan secara ikhlas dalam kegiatan untuk mendorong, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas kehidupan di bidang sosial, budaya dan ekonomi. Dimana hal tersebut bukan hanya sekedar pemikiran, melainkan juga usaha untuk membela serta mewujudkan pemikiran tersebut.

Veni dalam Sutrisno (2015: 4) memberikan penjelasan mengenai arti relawan, dimana relawan adalah seorang yang secara sukarela (*uncoerced*) menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran dan keahliannya untuk menolong orang lain (*help others*) serta sadar bahwa tidak akan mendapatkan upah atau gaji atas apa yang telah disumbangkan (*unremunerated*). Menjadi relawan adalah salah satu aktivitas yang dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud kepedulian dan komitmennya terhadap sebuah visi tertentu. Relawan dan kerelawanan memiliki konotasi yang sangat positif di dalam masyarakat. Relawan dan aktivitas kerelawanan menjadi sebuah gerakan sosial sekaligus menjadi modal sosial yang dahsyat untuk menciptakan sebuah perubahan.

Meningkatnya pengaruh relawan politik dalam bentuk partisipasi pada kontestasi pemilu presiden 2014 begitu terlihat, dimana ini dibuktikan dengan

banyaknya para relawan yang bahu-membahu untuk turun ke jalan mendukung calonnya masing-masing. Hal tersebut seolah menggambarkan kedewasaan mereka dalam mengawal transisi demokrasi. Fenomena ini sejalan dengan pendapat Verba, Schlozman, dan Brady dalam Arianto (2014: 134) bahwa partisipasi warga negara merupakan jantung demokrasi. Artinya, bahwa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, relawan politik telah mampu membangkitkan semangat demokrasi di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi Indonesia telah mengarah ke demokrasi kerakyataan yang berproses dan bergerak dari bawah ke atas (*bottom up*). Bukan sebaliknya, dimana demokrasi elitis yang hanya dimonopoli oleh sebagian elit politik sebagai pelaku utama.

Menurut Savirani dalam Arianto (2014: 132), ada 3 kelompok yang dapat dikategorikan sebagai relawan politik. Yang pertama adalah relawan yang memiliki latar belakang aktivis yang terlibat dalam dinamika politik tahun 1990an atau yang lebih dikenal sebagai aktivis gerakan pro-demokrasi untuk menggulingkan rezim Soeharto. Kedua adalah relawan yang berasal dari berbagai organisasi non-pemerintah, seperti kelompok gerakan anti korupsi, petani dan kelompok-kelompok masyarakat adat. Kemudian yang terakhir adalah dari kalangan seniman dan orang-orang yang memiliki latar belakang dari industri kreatif. Selain latar belakangnya, terdapat perbedaan dari ketiga kategori tersebut dimana kelompok pertama dan kedua cenderung telah memiliki agenda politik, namun tidak memiliki massa yang jelas. Sedangkan kelompok yang ketiga tidak memiliki agenda politik namun memiliki jaringan massa yang besar dari semua

lapisan masyarakat karena modal popularitasnya sebagai seorang seniman atau artis.

2. Peran Relawan Politik

Relawan Politik dalam perkembangannya memiliki peran yang cukup berpengaruh dalam perkembangan politik dan pemerintahan di Indonesia. Dimana salah satunya disampaikan oleh Arianto (2016: 51), dimana seiring dengan berkembangnya dinamika politik di Indonesia, secara organisatoris relawan yang berperan mendukung Jokowi dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu relawan komunitas dan relawan non komunitas. Relawan komunitas, merupakan relawan yang tergabung dalam barisan komunitas yang memiliki ketua atau koordinator seperti layaknya sebuah organisasi. Sedangkan relawan non komunitas, biasanya bergerak dan bekerja seorang diri untuk menyebarkan pesan-pesan kampanye Jokowi. Relawan non komunitas biasanya bekerja sesuai kemampuan dan kreativitas masing-masing dengan tujuan agar publik dapat semakin mengenal sosok Jokowi.

Lebih mendalam lagi, Samah dan Susanti (2014: 62) menjelaskan bahwa tidak semua komunitas relawan politik memiliki peran serta tujuan yang sama. Apabila melihat dari aktivitas kegiatannya, relawan politik dapat dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, relawan narsis adalah mereka yang sekedar mencari popularitas. Seperti relawan yang membuat spanduk dukungan untuk Jokowi dan disertai foto dirinya sendiri. Kedua, relawan rente, yaitu relawan yang sering membuat berbagai kegiatan dan aktivitas dukungan terhadap Jokowi, namun dengan tujuan dan target mencari keuntungan semata. Para relawan ini biasanya menjadi event organizer dalam suatu acara dukungan dan mengedarkan proposal

untuk pelaksanaan acaranya, yang muaranya adalah untuk mendapatkan laba dari acara tersebut. Ketiga, relawan *fans club*, contohnya adalah mereka yang aktivitasnya hanya memuji-muji apapun yang dilakukan Jokowi dan marah-marah jika ada yang memojokkan Jokowi. Para relawan ini tidak akan segan-segan membela Jokowi apabila dihina di media sosial. Biasanya jenis relawan politik ini berasal dari kalangan anak muda dan artis.

Pasca pemilu peran relawan dalam dunia politik semakin berkembang. Arianto (2014: 56) menjelaskan bahwa strategi para relawan politik pasca kontestasi politik 2014 ada 2, yaitu berperan sebagai *intra government* dan berperan sebagai *ekstra government*. Peran *intra government* seringkali ditafsirkan dengan melakukan aktivitas politik dalam lingkup institusi yakni pemerintahan Jokowi. Beberapa aktivitas politik yang diambil dalam *intra government* adalah turut berupaya mensukseskan dokumen Nawacita dan gerakan revolusi mental dalam langgam politik Indonesia. Artinya peran ini diambil dengan tujuan mengawal dan membantu kelancaran pemerintahan Jokowi. Sedangkan peran *ekstra government* memiliki tujuan sebagai pengawas dan penyeimbang terhadap kekuasaan negara atau pemerintahan Jokowi. Peran ini berusaha membangun karakter *ekstra government* yang dalam konteks ini dapat dilihat sebagai aktivitas politik yang diselenggarakan oleh kelompok-kelompok di luar institusi-institusi tersebut.

Arianto (2014: 58) juga menjelaskan lebih mendalam bahwa peran dari para relawan dalam berpartisipasi di dunia politik dapat menghasilkan beberapa hal diantaranya adalah mempengaruhi (*influencing*) proses pelaksanaan kebijakan publik mengawasi (*monitoring*) proses pelaksanaan kebijakan publik.

memberikan penilaian (*evaluating*) pelaksanaan kebijakan publik, serta memberikan bantuan dan pembelaan (*advocacy*) terhadap kelompok-kelompok yang dirugikan atas pelaksanaan kebijakan publik.

Alam, Arditama dan Seftyono (2017: 147-148) menambahkan bahwa dengan besarnya pengaruh relawan dalam dunia politik Indonesia maka relawan akan dapat menghasilkan perubahan-perubahan positif dalam demokrasi Indonesia. Dengan besarnya kemampuan yang dimiliki relawan untuk memobilisasi massa dan menjadi kunci kemenangan penguasa, tentu saja akan menjadikan fenomena relawan ini sebagai kekuatan politik baru yang akan mempengaruhi (*influencing*) proses pelaksanaan kebijakan publik yang dibuat oleh penguasa nantinya. Lebih dari itu, dengan dukungan yang diperoleh dari masyarakat karena berkurangnya kepercayaan terhadap partai politik, memberikan tugas berat untuk kelompok relawan menjaga kepercayaan masyarakat sebagai pengawas dalam proses pelaksanaan kebijakan publik.

3. Strategi Mempertahankan Eksistensi Relawan Politik

Seiring berjalannya waktu, Relawan Politik harus memiliki kekuatan untuk mempertahankan eksistensinya dalam dunia politik. Sutrisno (2015: 6) menjelaskan bahwa dalam Teori Voluntarisme Sipil, bahwa seseorang atau sekelompok relawan akan mampu mempertahankan eksistensinya dalam berpartisipasi di dunia politik jika memiliki kapasitas atau sumberdaya (*resources*) dan hubungan masyarakat (*Social network*). Di dalam teori ini dinyatakan bahwa ada tiga komponen dalam voluntarisme yang menjadi indikator dalam menjaga eksistensi relawan politik, yaitu kapasitas (*resources*), keterikatan atau pilihan (*engagement*), dan mengaiak atau menyuruh memilih (*recruitment*).

Sutrisno (2015: 10-13) menjelaskan secara lebih mendalam mengenai komponen yang ada dalam teori atau model voluntarisme sipil (*civic volunteerism model*). Kapasitas atau sumberdaya (*resources*) dan hubungan masyarakat (*Social network*) diartikan bahwa setiap relawan politik memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga relawan politik perlu memiliki serta diberikan pemahaman mengenai pengetahuan seputar kerelawanan serta tugas-tugasnya sebagai seorang relawan politik. Dengan adanya pemahaman dari relawan yang memiliki kemampuan berbeda-beda ini maka akan mengembangkan jaringan masyarakat yang diperoleh dan dimiliki oleh para relawan tersebut.

Keterikatan atau pilihan (*engagement*) diartikan bahwa perlu adanya pengelolaan relawan oleh organisasi maupun kelompok terkait sehingga para relawan yang jumlahnya tidak sedikit dapat terikat dan terkoorganisir dengan baik. Apabila tidak ada pengelolaan yang baik maka akan ada kendala serta perselisihan yang muncul di dalam tubuh relawan itu sendiri, terlebih jika tidak ada komunikasi dan loyalitas yang baik dari para relawan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterikatan ini akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan para relawan mewujudkan misinya. Kemudian mengajak atau menyuruh memilih (*recruitment*) diartikan bahwa peran relawan dalam partisipasi politik akan menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat untuk aktif dalam demokrasi, dengan saling bahu membahu menggerakkan masyarakat tersebut. Dengan keuntungan yang dimiliki relawan untuk dapat bertemu langsung, memotivasi dan menjelaskan kepada masyarakat maka secara spesifik relawan akan merangsang masyarakat untuk sadar terhadap pentingnya partisipasi dalam politik.

Semakin terorganisirnya para relawan yang kemudian menyatukan diri dan membentuk sebuah organisasi yang militan, maka akan menjadi ancaman bagi pemerintahan apabila tidak sejalan dengan harapan rakyat. Semakin jelasnya arah gerak dari relawan, tentu akan menjadikan pemerintah berhati-hati karena organisasi relawan akan terus memantau dan memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan. Apabila dalam berjalannya pemerintahan, kebijakan yang dibuat pemerintah merugikan masyarakat, organisasi relawan harus menjadi garda terdepan sebagai pemberi bantuan dan pembelaan karena relawan juga bertanggung jawab dalam kebijakan tersebut. Dari hal tersebutlah maka dalam perkembangannya, relawan politik menjadi sebuah kekuatan baru dalam dunia politik serta berpengaruh besar terhadap berjalannya pemerintahan.

F. Definisi Konseptual

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Partisipasi politik dapat diartikan sebagai sukarela dinilai dari sejauh mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa serta mengambil bagian dalam proses pembentukan kebijakan umum, dimana hal tersebut didasarkan atas kemauan sendiri untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Relawan politik diartikan sebagai seorang yang secara sukarela (*uncoerced*) menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran dan keahliannya untuk mendorong, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas politik, serta sadar bahwa tidak akan mendapatkan upah atau gaji atas apa yang telah disumbangkan (*unremunerated*).

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisis data maka penelitian perlu diberi batasan yang bertujuan untuk menjawab masalah penelitian. Dalam mengukur peran Projo DIY dalam partisipasinya sebagai organisasi relawan terhadap pemerintahan Jokowi, penulis merujuk pada indikator yang terdapat pada teori dari Arianto yang menyebutkan bahwa indikatornya adalah sebagai berikut:

- 1) Mempengaruhi proses pelaksanaan pemerintahan
 - a. Keikutsertaan relawan pro jokowi dalam struktur pemerintahan
 - b. bentuk nyata dari peran relawan pro jokowi dalam dalam proses pelaksanaan pemerintahan
- 2) Mengawasi proses pelaksanaan pemerintahan
 - a. Keikutsertaan relawan pro jokowi sebagai organisasi pengawas pemerintah
 - b. Bentuk nyata dari pengawasan relawan pro jokowi terhadap pemerintah
- 3) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pemerintahan
 - a. Keikutsertaan relawan pro jokowi untuk memberikan penilaian kinerja pemerintahan selama periode 2014-2019
 - b. Bentuk nyata dari penilaian yang diberikan relawan pro jokowi terhadap pemerintah
- 4) Memberikan bantuan dan pembelaan terhadap kelompok-kelompok yang dirugikan atas pelaksanaan pemerintahan
 - a. Keikutsertaan relawan pro jokowi dalam kegiatan advokasi terhadap suatu kelompok yang dirugikan oleh pemerintah

- b. Bentuk nyata dari kegiatan advokasi yang dilakukan oleh relawan pro jokowi

Sedangkan dalam mengukur strategi Projo DIY dalam mempertahankan eksistensinya sebagai organisasi relawan, penulis merujuk pada teori voluntarisme sipil dari Sutrisno yang dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Sumberdaya dan hubungan masyarakat.
 - a. Latar belakang anggota relawan pro jokowi
 - b. Menjaga SDM anggota relawan pro jokowi
 - c. Jaringan yang dimiliki relawan pro jokowi
- 2) Keterikatan
 - a. Pengelolaan keanggotaan relawan pro jokowi
 - b. Strategi komunikasi antar anggota relawan pro jokowi untuk menjaga keutuhan relawan pro jokowi
- 3) mengajak atau menyuruh memilih
 - a. Strategi relawan pro jokowi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat
 - b. Strategi relawan pro jokowi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi

Untuk itu, penulis membuat dalam bentuk tabel seperti berikut:

Tabel 1.1

Definisi konsep dan operasional

No	Definisi Konsep	Definisi Operasional	Indikator
1.	Sumberdaya dan	d. Latar belakang anggota	

	hubungan masyarakat	<p>relawan pro jokowi</p> <p>e. Peningkatan kualitas SDM anggota relawan pro jokowi</p> <p>f. Jaringan yang dimiliki relawan pro jokowi</p>	
2.	Keterikatan	<p>a. Pengelolaan keanggotaan relawan pro jokowi</p> <p>b. Strategi komunikasi antar anggota relawan pro jokowi untuk menjaga keutuhan relawan pro jokowi</p>	
3.	mengajak atau menyuruh memilih	<p>a. Strategi relawan pro jokowi dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat</p> <p>b. Strategi relawan pro jokowi untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi</p>	
4.	Mempengaruhi (<i>influencing</i>) proses pelaksanaan pemerintahan	<p>a. Keikutsertaan relawan pro jokowi dalam struktur pemerintahan</p> <p>b. bentuk nyata dari peran relawan pro jokowi dalam</p>	

		dalam proses pelaksanaan pemerintahan	
5.	Mengawasi (<i>monitoring</i>) proses pelaksanaan pemerintahan	<p>a. Keikutsertaan relawan pro jokowi sebagai organisasi pengawas pemerintah</p> <p>b. Bentuk nyata dari pengawasan relawan pro jokowi terhadap pemerintah</p>	
6.	Memberikan penilaian (<i>evaluating</i>) terhadap pelaksanaan pemerintahan	<p>a. Keikutsertaan relawan pro jokowi untuk memberikan penilaian kinerja pemerintahan selama periode 2014-2019</p> <p>b. Bentuk nyata dari penilaian yang diberikan relawan pro jokowi terhadap pemerintah</p>	
7.	Memberikan bantuan dan pembelaan (<i>advocacy</i>) terhadap kelompok-kelompok yang dirugikan atas pelaksanaan pemerintahan	<p>a. Keikutsertaan relawan pro jokowi dalam kegiatan advokasi terhadap suatu kelompok yang dirugikan oleh pemerintah</p> <p>b. Bentuk nyata dari kegiatan advokasi yang dilakukan oleh relawan pro jokowi</p>	

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2007: 5), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan wawancara terbuka sebagai cara untuk menelaah dan memahami sikap, perasaan, pandangan, dan perilaku dari individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif juga bertujuan untuk memahami fenomena serta kejadian yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya persepsi, tindakan, sikap, dan motivasi secara mendalam kemudian dipaparkan dengan cara mendeskripsikannya kedalam susunan kalimat dengan konteks yang alamiah menggunakan metode ilmiah.

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2012 : 35) metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian untuk mengetahui nilai variabel mandiri yang menjelaskan mengenai suatu objek, kondisi, sikap, pandangan dimana data yang diperoleh berasal dari hasil wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya dianalisis oleh peneliti dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

2. Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dewan Pimpinan Daerah DIY Organisasi relawan Pro Jokowi. Lokasi ini dipilih karena penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk voluntarisme dari relawan Pro Jokowi dalam mendukung Jokowi khususnya di Yogyakarta.

3. Jenis Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber yang diamati kemudian dicatat. Data penelitian ini, diperoleh dari sumber yang berkaitan langsung dengan penelitian. Data primer ini dilaksanakan dengan metode wawancara terhadap unit analisa yang dijadikan sebagai narasumber. Wawancara tersebut dilaksanakan dengan narasumber dari relawan pro Jokowi membahas tentang bentuk voluntarisme relawan pro Jokowi dalam mendukung Jokowi selama periode 2014-2019.

b. Data Sekunder

Menurut Sutopo (2006: 56) data sekunder adalah data yang pengumpulannya tidak diperoleh langsung oleh peneliti, misalnya data yang diperoleh dari sumber buku, majalah ilmiah, arsip, serta publikasi lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh adalah melalui data lapangan dengan melihat kondisi dilapangan, literature-literature, buku, Koran elektronik, serta dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu melalui dokumentasi dan wawancara.

a. Dokumentasi

Menurut Yusuf (2014: 39) dokumen merupakan catatan atau karya seseorang mengenai sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen dapat berisi mengenai seseorang, sekelompok orang, peristiwa, serta kejadian dalam keadaan tertentu. Dokumen yang digunakan bersumber dari arsip-arsip data yang berhubungan dengan bentuk voluntarisme relawan pro Jokowi dalam mendukung Jokowi selama periode 2014-2019. Data tersebut diperoleh dari website obyek yang diteliti, berita di media cetak seperti koran elektronik, serta buku yang di dalamnya berisikan penjelasan yang berkaitan dengan obyek.

b. Wawancara

Menurut Yusuf (2014: 37) wawancara adalah suatu metode pengumpulan data melalui kontak langsung antara peneliti dengan narasumber. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan objek yang diteliti yaitu anggota relawan Pro Jokowi.

5. Teknik Analisa Data

Prinsip pokok teknik analisis kualitatif adalah proses pengolahan data dan cara menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna. Menurut Sarwono (2006: 239-240) prosedur analisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengolah data yang dilakukan dengan membaca berulang kali data yang ada sehingga dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitian dan membuang yang tidak perlu.
2. Membuat kategori yaitu mengelompokan data ke dalam kategori dengan tema masing-masing sehingga data menjadi teratur.
3. Memberikan keterangan yang masuk akal terhadap data yang ada dan menerangkan data tersebut didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data.
4. Menulis laporan dengan menuliskan kata, frasa, dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.

Kemudian Suryana (2010: 42) juga menjelaskan tahapan dari analisa data sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan. Dalam tahap deskripsi data yang diperoleh cukup banyak, bervariasi dan belum tersusun dengan jelas.
2. Tahap kedua adalah tahap reduksi atau fokus, mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Memilih data mana yang menarik, penting, berguna serta baru. Kemudian data tersebut dikelompokan dalam kategori yang telah ditetapkan sebagai fokus penelitian.
3. Tahap ketiga adalah seleksi, dimana peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci misalnya menyangkut perencanaan, evaluasi dan sebagainya. Kemudian diuji validitasnya, sehingga mendapatkan

temuan yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil dari jawaban atas rumusan masalah.

I. Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pada Bab I memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka dasar teori, definisi konseptual, definisi operasional, metode penelitian serta rencana sistematika penulisan. Pada Bab II menjelaskan secara singkat tentang profil subyek yang diteliti, serta lokasi penelitian yang akan diteliti.

Pada Bab III menjelaskan tentang hasil dari penelitian dan menganalisis hasil dari penelitian tentang bentuk voluntarisme relawan Pro Jokowi DIY dalam mendukung Pemerintahan Jokowi. Pada Bab IV menguraikan tentang kesimpulan dari hasil analisis peneliti dan saran dari penelitian yang telah dilakukan